**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019**

Jl. Majapahit No.58

Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074

 e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com

**Jl. Majapahit No.58**

**Mataram - Nusa Tenggara Barat**

****

**LAPORAN KEUANGAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Majapahit No.58**

**Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074**

 **Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126**

 **e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com**

*KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, 15 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

MISNUDIN, S.H., M.H.

NIP.196412311994031046

*DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

[Kata Pengantar i](#_Toc22281165)

[Daftar Isi ii](#_Toc22281166)

[Pernyataan Tanggung Jawab iii](#_Toc22281167)

[Ringkasan 10](#_Toc22281168)

[I. Laporan Realisasi Anggaran 13](#_Toc22281169)

[II. Neraca 15](#_Toc22281170)

[III. Laporan Operasional 18](#_Toc22281171)

[IV. Laporan Perubahan Ekuitas 21](#_Toc22281172)

[V. Catatan atas Laporan Keuangan 23](#_Toc22281173)

[A. Penjelasan Umum 23](#_Toc22281174)

[A.1. Dasar Hukum 23](#_Toc22281175)

[A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat 24](#_Toc22281176)

[A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 25](#_Toc22281177)

[A.4. Basis Akuntansi 26](#_Toc22281178)

[A.5. Dasar Pengukuran 26](#_Toc22281179)

[A.6. Kebijakan Akuntansi 27](#_Toc22281180)

[B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 34](#_Toc22281181)

[B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 34](#_Toc22281182)

[B.2. Belanja 34](#_Toc22281183)

[C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 37](#_Toc22281184)

[C.1. Aset Lancar 37](#_Toc22281185)

[C.2. Aset Tetap 39](#_Toc22281186)

[C.5. Kewajiban Jangka Pendek 40](#_Toc22281187)

[C.6. Ekuitas 41](#_Toc22281188)

[D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 41](#_Toc22281189)

[D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 41](#_Toc22281190)

[D.2. Beban Pegawai 41](#_Toc22281191)

[D.3. Beban Persediaan 41](#_Toc22281192)

[D.4. Beban Barang dan Jasa 42](#_Toc22281193)

[D.5. Beban Pemeliharaan 42](#_Toc22281194)

[D.6. Beban Perjalanan Dinas 42](#_Toc22281195)

[D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 42](#_Toc22281196)

[D.8. Beban Bantuan Sosial 43](#_Toc22281197)

[D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 43](#_Toc22281198)

[D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 43](#_Toc22281199)

[D.11. Beban Lain-lain 43](#_Toc22281200)

[D.12. Kegiatan Non Operasional 43](#_Toc22281201)

[D.13. Pos Luar Biasa 44](#_Toc22281202)

[E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 44](#_Toc22281203)

[E.1. Ekuitas Awal 44](#_Toc22281204)

[E.2. Surplus (defisit) LO 44](#_Toc22281205)

[E.3. Penyesuaian Nilai Aset 44](#_Toc22281206)

[E.4. Koreksi Nilai Persediaan 44](#_Toc22281207)

[E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap 44](#_Toc22281208)

[E.6. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 44](#_Toc22281209)

[E.7. Koreksi Lain-lain 45](#_Toc22281210)

[E.8. Transaksi Antar Entitas 45](#_Toc22281211)

[E.9. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 45](#_Toc22281212)

[E.10. Transfer Masuk/Transfer Keluar 45](#_Toc22281213)

[E.11. Pengesahan Hibah Langsung 46](#_Toc22281214)

[E.12. Ekuitas Akhir 46](#_Toc22281215)

[F. Pengungkapan Penting Lainnya 46](#_Toc22281216)

[F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 46](#_Toc22281217)

[F.2. Pengungkapan Lain-lain 46](#_Toc22281218)

[Laporan-laporan Pendukung 48](#_Toc22281219)

[Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 49](#_Toc22281220)

[Daftar Hibah Langsung 51](#_Toc22281221)

[Daftar Hibah Langsung 51](#_Toc22281222)

[Konstruksi Dalam Pengerjaan 53](#_Toc22281223)

*PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

**Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat**

**Jl. Majapahit No.58 Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126**

 **Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074 e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.





Mataram, 15 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

MISNUDIN, S.H., M.H.

NIP.196412311994031046

*RINGKASAN*

# Ringkasan

 Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019*.*

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp230.000 atau mencapai 54 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp425.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp27.294.300 atau mencapai 14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp194.594.000.

1. **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2019 dan 2018. Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.713.746, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp30.713.746; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp713.746.

1. **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp225.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp27.294.300, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(27.069.300). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan Rp0, sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp(27.069.300).

1. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp718.746 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(27.069.300), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp27.064.300, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp713.746.

1. **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 , disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

1. *LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018**

***( dalam satuan Rupiah*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uraian | Catatan | TA 2019 | TA 2018 |
| **Anggaran**  | **Realisasi** | **%**  | **Realisasi** |
| A. | **Pendapatan Negara dan Hibah** | **B.1** |  |  |  |  |
| 1. | **Penerimaan Negara Bukan Pajak** | **B.1.1** | **425.000** | **230.000** | **54** | **205.000** |
|  | **Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah** |  | **425.000** | **230.000** | **54** | **205.000** |
| B. | **Belanja Negara** | **B.2** |  |  |  |  |
| 1. | **Belanja Pegawai** |  | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
| 2. | **Belanja Barang** |  | **194.594.000** | **27.294.300** | **14** | **135.397.700** |
| 3. | **Belanja Modal** |  | **0** | **0** | **0,00** | **0** |
|  | **Jumlah Belanja Negara** |  | **194.594.000** | **27.294.300** | **14** | **135.397.700** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *NERACA PERBANDINGAN*

# II. Neraca

 **PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT**

**NERACA**

**PER 30 JUNI 2019 DAN 2018**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2019 | 31 Desember 2018 |
| ASET |  |  |  |  |
| Aset Lancar | **C.1** |  |  |  |
| Kas dan Bank |  |  |  |  |
|  | **Kas di Bendahara Pengeluaran**  | **C.1.** |  | **30.000.000** | **0** |
|  | **Kas di Bendahara Penerimaan** |  |  | **0** | **5.000** |
|  | **Persediaan** | **C.1.** |  | **713.746** | **713.746** |
|  | **Jumlah Aset Lancar** |  |  | **30.713.746** | **718.746** |
| Aset Tetap  | **C.2** |  |  |  |
|  | **Tanah**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Peralatan dan Mesin**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Gedung dan Bangunan**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Aset Tetap Lainnya**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Konstruksi dalam Pengerjaan**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  | **C.2.** |  | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Aset Tetap**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Aset** |  |  | **30.713.746** | **718.746** |
| KEWAJIBAN |  |  |  |  |
| Kewajiban Jangka Pendek  | **C.5** |  |  |  |
|  | **Uang Muka dari KPPN**  | **C.5.** |  | **30.000.000** | **0** |
|  | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** |  |  | **10.000.000** | **0** |
|  | **Jumlah Kewajiban** |  |  | **10.000.000** | **0** |
| EKUITAS |  |  |  |  |
| Ekuitas  | **C.6** |  | **713.746** | **718.746** |
|  | **Jumlah Ekuitas**  |  |  | **713.746** | **718.746** |
|  | **Jumlah Kewajiban dan Ekuitas** |  |  | **30.713.746** | **718.746** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *LAPORAN OPERASIONAL*

# III. Laporan Operasional

 **PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**PER 30 JUNI 2019 DAN 2018**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2019 | 30 Juni 2018 |
| Kegiatan Operasional |  |  |  |  |
| Pendapatan |  |  |  |  |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | **D.1** |  | **225.000** | **205.000** |
| Jumlah Pendapatan |  |  | **225.000** | **205.000** |
| Beban |  |  |  |  |
|  | **Beban Pegawai** | **D.** | **2** | **0** | **0** |
|  | **Beban Persediaan** | **D.** | **3** | **0** | **0** |
|  | **Beban Barang dan Jasa** | **D.** | **4** | **0** | **1.200.000** |
|  | **Beban Pemeliharaan** | **D.** | **5** | **0** | **0** |
|  | **Beban Perjalanan Dinas** | **D.** | **6** | **27.294.300** | **134.197.700** |
|  | **Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat** | **D.** | **7** | **0** | **0** |
|  | **Beban Bantuan Sosial** | **D.** | **8** | **0** | **0** |
|  | **Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **D.** | **9** | **0** | **0** |
|  | **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih** | **D.** | **10** | **0** | **0** |
|  | **Beban Lain-lain** | **D.** | **11** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Beban** |  |  | **27.294.300** | **135.397.700** |
|  | **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional** |  |  | **(27.069.300)** | **(135.192.700)** |
| Kegiatan Non Operasional  | **D.** | **12** |  |  |
|  | **Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**  |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa** |  |  |  |  |
| Pos Luar Biasa | **D.**  | **13** |  |  |
|  | **Beban Luar Biasa** |  |  | **0** | **0** |
|  | **Surplus (Defisit) Laporan Operasional** |  |  | **(27.069.300)** | **(135.192.700)** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

# IV. Laporan Perubahan Ekuitas

 **PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**PER 30 JUNI 2019 DAN 2018**

***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2019 | 30 Juni 2018 |
| Ekuitas Awal | **E.** | **1** | **718.746** | **627.220** |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | **E.** | **2** | **(27.069.300)** | **(139.104.920)** |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar |  |  |  |  |
| Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas |  |  |  |  |
|  | **Penyesuaian Nilai Aset** | **E.** | **3** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Nilai Persediaan** | **E.** | **4** | **0** | **0** |
|  | **Selisih Revaluasi Aset Tetap** | **E.** | **5** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi** | **E.** | **6** | **0** | **0** |
|  | **Koreksi Lain-lain** | **E.** | **7** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah Lain-lain** |  |  | **0** | **0** |
| Transaksi Antar Entitas  | **E.** | **8** | **27.064.300** | **139.196.446** |
| Ekuitas Akhir |  |  | **713.746** | **718.746** |

***\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.***

1. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

# V. Catatan atas Laporan Keuangan

## Penjelasan Umum

### Dasar Hukum

|  |
| --- |
| * 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 |
| * 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 |
| * 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 |
| * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
 |
| * 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 |
| * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 |
| * 1. Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor10 Tahun 2010Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
 |
| * 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
 |
| * 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
 |
| * 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
 |
| * 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 |

### Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat

Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempunyai visi "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung". Adapun penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya;
	2. Mataram, menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Tinggi Agama;
	3. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengadilan.
2. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan.
3. Meningkatnya Proses penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan biaya ringan.
4. Tertib administrasi perkara.
5. Mudahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan.
6. Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
7. Putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan eksekutebel.
8. Pelaksanaan putusan/penetapan (eksekutebel) dan penyelesaian yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.

### Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

#### Pendapatan LRA

* + Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
	+ Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
	+ Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Pendapatan LO

* Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
* Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
	+ - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
		- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
		- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
* Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
* Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

####  Belanja

* + Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
	+ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
	+ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
	+ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

####  Beban

* Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
* Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
* Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

####  Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

* Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
* Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
* Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
* Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
| Lancar | **Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo** | **0.5%** |
| Kurang Lancar | **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan** | **10%** |
| Diragukan | **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan** | **50%** |
| Macet | 1. **Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan**
2. **Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**
 | **100%** |

* Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
* Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

* Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
* Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
* Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
* Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
* Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### Penyusunan Aset Tetap

* Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
* Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
	1. Tanah
	2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
	3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
* Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
* Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
* Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

|  |  |
| --- | --- |
| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

#### Piutang Jangka Panjang

* + - Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
		- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### Aset Lainnya

* Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
* Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
* Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
* Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

|  |  |
| --- | --- |
| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
| *Software* Komputer | 4 |
| *Franchise* | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

* + Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

* Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
* Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
1. Kewajiban Jangka Pendek
2. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
4. Kewajiban Jangka Panjang
5. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
* Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

#### Ekuitas

* Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pendapatan Negara dan Hibah |
| ***Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp230.000*** | Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.230.000 atau mencapai 54,12 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.425.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. |
|  | Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019 ***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|  | **Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya** | **425.000** | **230.000** | **54,12** |
|  | **Total Pendapatan** | **425.000** | **230.000** | **54,12** |

  |
|  | Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp25.000 atau 12,20 persen dibandingkan TA 2018 periode yang sama. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah perkara banding yang dapat diselesaikan pada Semester I Tahun 2019 dibandingkan 2018 yaitu sebanyak 5 perkara.Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019 dan 2018***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | TA 2019 |  TA 2018 | Perubahan |
| Rp | % |
|  | **Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya** | **230.000** | **205.000** | **25.000** | **12,20** |
|  | **Total Pendapatan** | **230.000** | **205.000** | **25.000** | **12,20** |

   |
|  | Belanja  |
| ***Realisasi Belanja Negara : Rp27.294.300***  | Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat per 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp27.294.300 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 14,03% dari anggaran senilai Rp194.594.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |
| --- | --- |
| Uraian |  30 Juni TA 2019  |
| **Pagu** | **Realisasi** | **%** |
|  Belanja Pegawai | **0** | **0** | **0,00** |
|  Belanja Barang | **194.594.000** | **27.294.300** | **14,03** |
|  Belanja Modal | **0** | **0** | **0,00** |
|  Total Belanja Bruto | **194.594.000** | **27.294.300** | **14,03** |
|  Pengembalian Belanja | **0** | **0** | **0** |
|  Total Belanja Netto | **194.594.000** | **27.294.300** | **14,03** |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 *(dalam satuan Rupiah)****Sumber: Laporan Keuangan SAIBA 2019 dan 2018***Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp(108.103.400) atau sebesar (79,84) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena sudah tidak ada lagi belanja honor operasional satker yang berlaku Tahun 2019. Selain itu penurunan belanja juga disebabkan karena kegiatan perjalanan dinas belum dapat banyak dilaksanakan selama Semester I. Pengawasan dan Pembinaan dilaksanakan pada bulan Juli 2019.Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2017 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2018  | TA 2017  | Naik (Turun) |
| **Rp** | **%** |
|  Belanja Pegawai | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
|  Belanja Barang | **27.294.300** | **135.397.700** | **(108.103.400)** | **-79,84** |
|  Belanja Modal | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| Total Belanja | **27.294.300** | **135.397.700** | **(108.103.400)** | **-79,84** |

 |
|  | Belanja Barang |
| ***Realisasi Belanja Barang : Rp 27.294.300*** | Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp27.294.300 dan Rp135.397.700.Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan sebesar -79,84 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena sudah tidak ada lagi belanja honor operasional satker yang berlaku Tahun 2019. Selain itu penurunan belanja barang juga disebabkan karena kegiatan perjalanan dinas belum dapat banyak dilaksanakan selama Semester I. Pengawasan dan Pembinaan dilaksanakan pada bulan Juli 2019.Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 6 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2019  | TA 2018  | Perubahan |
|  | **Realisasi** | **Realisasi** | **Rp** | **%** |
| Belanja Barang Operasional  | **0** | **1.200.000** | **(1.200.000)** | **-100,00** |
| Belanja Perjalanan Dinas  | **27.294.300** | **134.197.700** | **(106.903.400)** | **-79,66** |
| Total Belanja Brutto | **27.294.300** | **135.397.700** | **(108.103.400)** | **-79,84** |
| Pengembalian Belanja | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Total Belanja Netto | **27.294.300** | **135.397.700** | **(108.103.400)** | **-79,84** |

 |

## Penjelasan atas Pos-pos Neraca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Aset Lancar: Rp 30.713.746*** | Aset LancarNilai Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp30.713.746 dan Rp718.746.Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat per 30 Juni 2019 dan 2018 disajikan pada tabel di bawah:Tabel 7 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uraian | TA 2019 | TA 2018 |
|  | **Kas di Bendahara Pengeluaran**  | **30.000.000** | **0** |
|  | **Kas di Bendahara Penerimaan** | **0** | **5.000** |
|  | **Persediaan** | **713.746** | **713.746** |
|  | **Total Aset Lancar** | **30.713.746** | **718.746** |

 |
|  | Kas di Bendahara Pengeluaran |
| ***Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 30.000.000***  | Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp30.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :Tabel 8 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis | 30 Juni TA 2019  | 30 Juni TA 2018 |
| 1 | **Uang Persediaan** | **30.000.000** | **0** |
|  | **Jumlah** | **30.000.000** | **0** |

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdiri dari Uang Persediaan yang digunakan untuk operasional kantor. Adapun uang persediaan terdiri dari uang tunai sejumlah Rp30.000.000 dan saldo bank senilai Rp0.  |
|  | Kas di Bendahara Penerimaan |
| ***Kas di Bendahara Penerimaan: Rp0*** | Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp5.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :Tabel 9 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis | 30 Juni TA 2019  | 30 Juni TA 2018 |
| 1 | **Kas** | **0** | **5.000** |
|  | **Jumlah** | **0** | **5.000** |

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut terdiri dari PNBP yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan per periode yang lalu. |
|  | Persediaan |
| ***Persediaan: Rp713.746*** | Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp713.746 dan Rp713.746. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:Tabel 10 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 31 Desember 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | 30 Juni 2019 | 31 Desember 2018 |
| 1 | **Barang Konsumsi** | **713.746** | **713.746** |
|  | **Total** | **713.746** | **713.746** |

 Persediaan seluruhnya berada dalam kondisi baik menurut berita acara pemeriksaan opname fisik persediaan tanggal 28 Juni 2019 nomor W22-A/909.b/OT.01.2/VI/2019. |
|  | Aset Tetap |
| ***Aset Tetap : Rp 0***  | Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut : |
|  | Tabel 11 Rincian Aset Tetap*(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Uraian | TA 2019 | TA 2018 | Perubahan |
| 1 | **Tanah** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | **Peralatan dan Mesin** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | **Gedung dan Bangunan** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | **Jalan , Irigasi, dan Jaringan** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | **Aset Tetap Lainnya** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | **Konstruksi dalam Pengerjaan** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Jumlah** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Akumulasi Penyusutan** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Nilai Buku Aset Tetap** | **0** | **0** | **0** |

 |
|  | Tanah |
| ***Tanah: Rp0***  | Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  |
|  | Peralatan dan Mesin |
| ***Peralatan dan Mesin : Rp 0***  | Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. |
|  | Gedung dan Bangunan |
| ***Gedung dan Bangunan : Rp 0***  | Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. |
|  | Jalan , Irigasi, dan Jaringan |
| ***Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 0***  | Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  |
|  | Aset Tetap Lainnya |
| ***Aset Tetap Lainnya: Rp 0***  | Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  |
|  | Konstruksi dalam Pengerjaan |
| ***Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0***  | Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.  |
|  | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap |
| ***Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp 0*** | Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).  |
|  | Kewajiban Jangka Pendek |
| ***Kewajiban Jangka Pendek :******Rp30.000.000***  | Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp30.000.000 dan Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat per 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah :Tabel 12. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2019 | TA 2018 |
| Uang Muka dari KPPN  | **30.000.000** | **0** |
| Jumlah | **30.000.000** | **0** |

 |
|  | Uang Muka dari KPPN |
| ***Uang Muka dari KPPN:*** ***Rp 30.000.000***  |  Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp30.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. |
|  | Ekuitas |
| ***Ekuitas:******Rp713.746*** | Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp713.746 dan Rp718.746. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. |
| Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional |
| Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak |
| ***Pendapatan PNBP: Rp225.000*** | Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp225.000 dan Rp205.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019 ***(dalam satuan Rupiah)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  Uraian | TA 2019 | TA 2018 | % |
|  | **Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya** | **225.000** | **205.000** | **9,76** |
|  | **Total Pendapatan** | **225.000** | **205.000** | **9,76** |

 |
| Beban Pegawai |
| Beban Persediaan |
| ***Beban Persediaan : Rp0***  | Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.  |
| Beban Barang dan Jasa |
| ***Beban Barang dan Jasa : Rp0*** | Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.200.000. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2019 | TA 2018 | Naik(Turun) | % |
|  Beban Honor Operasional Satuan Kerja | **0** | **1.200.000** | **(1.200.000)** | **-100**  |
|  Total Beban Jasa | **0** | **1.200.000** | **(1.200.000)** | **-100** |

 |
| Beban Pemeliharaan |
| ***Beban Pemeliharaan: Rp0*** | Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.  |
| Beban Perjalanan Dinas |
| ***Beban Perjalanan Dinas : Rp27.294.300*** | Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp27.294.300 dan Rp134.197.700. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | TA 2019 | TA 2018  | Naik (Turun) | % |
|  Beban Perjalanan Biasa | **27.294.300** | **128.257.700** | **(100.963.400)** | **-78,72** |
| Beban Perjalanan Dinas dalam Kota | **0** | **5.940.000** | **(5.940.000)** | **-100,00** |
|  Total Beban Perjalanan Dinas | **27.294.300** | **134.197.700** | **(106.903.400)** | **-79,66** |

 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| ***Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp0***  | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.  |
| Beban Bantuan Sosial |
| ***Beban Bantuan Sosial : Rp0***  | Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.  |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi |
| ***Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp0***  | Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0*.* Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.  |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih |
| ***Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0***  | Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.  |
| Beban Lain-lain |
| ***Beban Lain-Lain : Rp0***  | Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.  |
| Kegiatan Non Operasional |
| ***Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0***  | Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.  |
| Pos Luar Biasa |
| ***Beban Pos Luar Biasa : Rp0***  | Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.  |
| Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas |
| Ekuitas Awal |
|  | Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 masing-masing Rp718.746 dan Rp627.220.  |
| Surplus (defisit) LO |
|  | Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(27.069.300) dan Rp(139.104.920). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. |
| Penyesuaian Nilai Aset |
|  | Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir |
| Koreksi Nilai Persediaan |
|  | Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.  |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap |
|  ***.***  | Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.  |
| Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi |
|  ***.***  | Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.  |
| Koreksi Lain-lain |
|  | Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.  |
|  Transaksi Antar Entitas |
|  | Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp27.064.300 dan Rp139.196.446. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  per 30 Juni TA 2019 *(dalam satuan Rupiah)*

|  |  |
| --- | --- |
| Transaksi antar Entitas | Nilai |
| Diterima dari Entitas Lain | **-230.000**  |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | **27.294.300** |
| Transfer Masuk | **0** |
| Transfer Keluar | **0** |
| Pengesahan Hibah Langsung | **0** |
| Pengesahan Pengembalian hibah Langsung | **0** |
| Jumlah | **27.064.300** |

 |
| Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) |
|  | Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp230.000 sedangkan DKEL sebesar Rp27.294.300. |

|  |
| --- |
| Transfer Masuk/Transfer Keluar |
|  | Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0. |

|  |
| --- |
| Pengesahan Hibah Langsung |
|  | Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2019.Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp0.Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Hibah |
| 1 | **NIHIL** | **Uang** | **0** |
| 2 | **NIHIL** | **Barang** | **0** |

 |
| Ekuitas Akhir |
| Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp713.746 dan Rp718.746.  |
|  |  |

## Pengungkapan Penting Lainnya

### Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk disajikan dalam laporan keuangan ini.

### Pengungkapan Lain-lain

#### Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan atas BPK dan tindak lanjutnya yang dapat diungkapkan pada laporan keuangan ini.

#### Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang dapat diungkapkan pada laporan keuangan ini.

#### Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat adalah:

* + - 1. Bank BRI Cabang Mataram A/C 0052-01-001217-30-8 a.n. RPL 038 PTA Mataram Utk PDT Bya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp3.072.129.
			2. BRI Cabang Mataram A/C 0052-01-001040-30-3 a.n. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0.

|  |
| --- |
| Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3Saldo Biaya Perkara PTA Nusa Tenggara Barat per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp3.280.129, yang terdiri dari uang tunai di brankas sebesar Rp208.000 dan saldo bank Rp3.072.129. |

#### Revisi DIPA

Tidak terdapat revisi DIPA untuk DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama NTB hingga 30 Juni 2019.

#### Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP maupun SSPB pada PTA NTB hingga akhir periode Semester I Tahun Anggaran 2019 ini.

#### Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting yang layak untuk diungkapkan pada Laporan Keuangan Semester I TA 2019 ini.

*LAPORAN PENDUKUNG*

# Laporan-laporan Pendukung

## Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

1. *RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat**

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap**

**untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019**

Tabel 13 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  Aset Tetap | Masa Manfaat | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Beban Penyusutan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|  |  |  |  | Per 31 Desember 2018 | 2019 | Per 30 Juni 2018 | Per 30 Juni 2019 |
| A. | **Peralatan dan Mesin** |  |  |  |  |  |  |
| B. | **Gedung dan Bangunan** |  |  |  |  |  |  |
| C. | **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** |  |  |  |  |  |  |
| D. | **Aset Tetap Lainnya** |  |  |  |  |  |  |
| E. | **Aset Tetap yang Tidak Digunakan** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** |  |  |  |  |  |
|  | **Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya** |  |  |  |  |  |

1. *DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/ BARANG/ JASA*

## Daftar Hibah Langsung

## Daftar Hibah Langsung

**Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat**

**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**

**untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019**

Tabel 14 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Sumber Dana | Nilai Hibah | Sudah Disahkan | Belum Disahkan |
|  |  | U |  |  |  | Nilai | Keterangan |
|  | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** | **NIHIL** |  |  |
|  | **Jumlah :** |  |  |  |  |

Tabel 15

1. *Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan*

## Daftar Hibah Langsung

**RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | LOKASI | NO. KONTRAK | NILAI KONTRAK | PERSENTASE PENGERJAAN | NILAI PEKERJAAN | KETERANGAN |
|  | NIHIL |  |  |  |  |  |  |